

**PENGEMBANGAN PERIKANAN LAUT
BERBASIS POTENSI WILAYAH PESISIR
DI KOTA PAREPARE**

*SEA FISHERY DEVELOPMENT
BASED ON COASTAL REGION POTENTIAL
OF PAREPARE*

ULFAH DJAMALUDDIN



**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2007**

**PENGEMBANGAN PERIKANAN LAUT
BERBASIS POTENSI WILAYAH PESISIR
DI KOTA PAREPARE**

*SEA FISHERY DEVELOPMENT
BASED ON COASTAL REGION POTENTIAL
OF PAREPARE*

ULFAH DJAMALUDDIN



**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2007**

**PENGEMBANGAN PERIKANAN LAUT
BERBASIS POTENSI WILAYAH PESISIR
DI KOTA PAREPARE**

Tesis

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar Magister

Program Studi

Perencanaan dan Pengembangan Wilayah

Disusun dan diajukan oleh

ULFAH DJAMALUDDIN

Kepada

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2007

TESIS

PENGEMBANGAN PERIKANAN LAUT BERBASIS POTENSI WILAYAH PESISIR DI KOTA PAREPARE

Disusun dan diajukan oleh

ULFAH DJAMALUDDIN

Nomor Pokok P0200204512

telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis
pada tanggal 23 Juni 2007
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui
Komisi Penasihat,

Prof. Dr. Dadang. A. Suriamihardja, M.Eng

Ketua

Ketua Program Studi
Perencanaan Pengembangan Wilayah

Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc

Anggota

Direktur Program Pascasarjana
Universitas Hasanuddin

Dr. Ir. Roland A. Barkey, DEA

Prof. Dr. dr. Abdul Razak Thaha, M.Sc

ABSTRAK

ULFAH DJAMALUDDIN. *Pengembangan Perikanan Laut Berbasis Potensi Wilayah Pesisir Di Kota Parepare* (dibimbing oleh D. A. Suriamihardja dan Jamaluddin Jompa).

Penelitian ini bertujuan (1) untuk menilai potensi yang dimiliki oleh Wilayah pesisir dan hambatan yang dihadapi dalam pengembangan perikanan laut di Kota Parepare tangkap, dan (2) untuk mengetahui strategi pengembangan perikanan laut berbasis potensi wilayah pesisir khususnya perikanan tangkap yang menjadi mata pencaharian nelayan.

Penelitian ini dilaksanakan di Pesisir Pantai Kota Parepare. Metode yang digunakan adalah Deskriptif Kualitatif dengan penyebaran daftar isian pertanyaan (kuisisioner) kepada nelayan tangkap sebagai responden. Pengambilan sampel dilakukan dengan cara mengambil sampel sebanyak 15% populasi, sehingga sampel yang digunakan sebanyak 50 RTP Tangkap. Teknis penarikan sampel menggunakan teknik *Simple Random Sampling*. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif menggunakan tabulasi dan persentase yang dilanjutkan dengan analisis SWOT.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kota Parepare memiliki potensi sebagai kota pantai dengan letak yang strategis, aksesibilitas yang lancar dan potensi keberadaan LAPAN dan industri yang bergerak disektor perikanan. Adapun hambatan yang hadapi nelayan tangkap yakni pendidikan yang rendah, pendapatan yang rendah, alat tangkap dan perahu/kapal yang digunakan masih bersifat tradisional, keterbatasan alat tangkap yang dimiliki nelayan, kemungkinan terjadinya bencana alam dan terjadi kenaikan harga dan kelangkaan BBM. Strategi yang dapat dilakukan dalam pengembangan perikanan laut khususnya perikanan tangkap, guna peningkatan produksi dan kesejahteraan nelayan tangkap antara lain; strategi pengembangan sumber daya manusia, strategi pengembangan infrastruktur dan strategi kebijakan pemerintah.

ABSTRACT

ULFAH DJAMALUDDIN. *Sea Fishery Development Based on Coastal Region Potential of Pare-pare* (supervised by D. A. Suriamihardja and Jamaluddin Jompa).

The objectives of the study are 1) to assess the potential of the coastal region and the obstruction it may have in the development of sea fishery of Pare-pare City, 2) To describe the development strategy of coastal potential based sea fishery particularly traditional fishery which becomes the main source of their livelihood.

The study is carried out in the coastal area of Pare-pare. The research applies qualitative-descriptive method. Questionnaires are distributed to a sample of 50 fishermen, which is 15 percent of the population selected by simple random sampling. The data are qualitatively described by proportion, tabulation and SWOT analysis.

The study indicates that, as a coastal city, Pare-pare is located in a strategic position, easily accessible, and has a potential existence of both a national aeronautics and space agency and an industry in the fishery sector. The obstacles that the traditional fisherman face are the poor educational background, poor income, the simple boats and traditional equipments, possible natural calamity, and scarcity of petroleum. The strategies that can be used in the development of sea fishery, particularly traditional one so that the fisherman's welfare and production increase are human resource development strategy, infrastructure development strategy and government policy strategy.

P R A K A T A

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulisan hasil penelitian ini dapat selesai, meskipun tidak tertutup kemungkinan masih terdapat berbagai kekurangan di dalamnya.

Penelitian ini berjudul "*Pengembangan Perikanan Laut Berbasis Potensi Wilayah Pesisir di Kota Parepare*", dilatarbelakangi dengan tajuk permasalahan yang timbul dari kehidupan masyarakat pesisir, dalam hal ini nelayan tangkap yang terpuruk dengan kemiskinan dalam keseharian mereka. Penelitian ini dilaksanakan dengan metode analisis deskriptif menggunakan teknik SWOT sebagai alat analisis.

Banyak kendala yang dihadapi oleh penulis dalam rangka penyusunan tesis ini, namun berkat bantuan berbagai pihak, maka tesis ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis dengan tulus menyampaikan terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. D. A. Suriamiharja, M.ENG dan Bapak Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc sebagai Ketua dan Anggota Komisi Penasihat, atas bantuan dan bimbingan yang telah diberikan.

Terima kasih juga penulis ucapkan kepada semua pihak yang telah turut membantu, teristimewa khususnya kepada kedua orang tua

dan adik-adikku tercinta, yang senantiasa memberikan dorongan dan doa yang tulus dalam menyelesaikan pendidikan.

Akhirnya penulis menyadari bahwa perbaikan hasil diperoleh masih harus terus disempurnakan, sehingga masukan dan kritikan dari berbagai pihak sangat diharapkan, guna melengkapi penulisan ini. Atas saran dan kritiknya kami mengucapkan terima kasih.

Makassar, Juni 2007
Penulis,

ULFAH DJAMALUDDIN

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : ULFAH DJAMALUDDIN
Nomor Mahasiswa : P0 200204512
Program Studi : Perencanaan dan Pengembangan
Wilayah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 23 Juni 2007

Yang menyatakan,

ULFAH DJAMALUDDIN

DAFTAR ISI

	Halaman
PRAKATA	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian	7
F. Penelitian Terdahulu yang Relevan	8
II. TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Konsep Wilayah	12
B. Konsep Pengembangan Wilayah	16
C. Batasan Wilayah Pesisir	17
D. Lingkungan Sosial Wilayah Pesisir dan Nelayan	19
E. Karakteristik Masyarakat Pesisir/Nelayan	21
F. Kerangka Pemikiran	24

III. METODE PENELITIAN	27
A. Jenis Penelitian	27
B. Waktu dan Lokasi Penelitian	27
C. Populasi dan Sampel	29
D. Jenis dan Sumber Data	30
E. Teknik Pengumpulan Data	31
F. Teknik Analisis Data	32
G. Definisi Operasional	35
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A. Gambaran Umum Kota Parepare	40
B. Keadaan Umum Pesisir Pantai Kota Parepare	45
C. Potensi Perikanan Laut Kota Parepare	49
D. Karakteristik Responden	61
E. Pendidikan Nelayan Tangkap	66
F. Pendapatan Nelayan Tangkap	69
G. Aktivitas Penangkapan Ikan	72
H. Strategi Pengembangan Perikanan Laut.....	85
V. PENUTUP	105
A. Kesimpulan	105
B. Saran	107

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Halaman
1. Daftar pertanyaan untuk kuisisioner	111
2. Pedoman wawancara dengan responden aparat pemerintah daerah	115
3. Pedoman wawancara dengan responden nelayan tangkap	117
4. Hasil kuisisioner berdasarkan karakteristik responden	118
5. Hasil kuisisioner berdasarkan pendapatan responden	120
6. Hasil kuisisioner berdasarkan sarana alat tangkap dan transportasi yang digunakan responden	125
7. Hasil kuisisioner berdasarkan sarana TPI/PPI yang digunakan responden	127
8. Daftar industri perikanan Kota Parepare	129
9. Daftar nama kapal nelayan dan kebutuhan BBM (solar) untuk PPI Cempae Kota Parepare Tahun 2006	130
10. Banyaknya alat tangkap perikanan berdasarkan kecamatan dan jenisnya di Kota Parepare Tahun 2005	132
11. Banyaknya Rumah Tangga Perikanan (RTP) berdasarkan kecamatan dan jenisnya di Kota Parepare Tahun 2005	133

DAFTAR TABEL

Nomor	Halaman
1. Matriks SWOT.....	33
2. Jumlah rumah tangga dan penduduk per kecamatan.....	43
3. Luas wilayah, jumlah penduduk dan kepadatan penduduk per kecamatan di Kota Parepare	43
4. PDRB berdasarkan atas dasar harga berlaku (Jutaan Rupiah) Kota Parepare Tahun 2003 – 2004	44
5. Jumlah rumah tangga dan penduduk per kecamatan dan kelurahan di wilayah pesisir Kota Parepare	47
6. Perkembangan produksi perikanan Kota Parepare Tahun 2003 – 2005.....	53
7. Karakteristik responden berdasarkan usia dan jenis kelamin	62
8. Karakteristik responden berdasarkan pekerjaan	63
9. Jumlah anggota keluarga responden	64
10. Tingkat pendidikan responden	67
11. Besar biaya pendidikan yang dibutuhkan responden	68
12. Tingkat pendapatan responden setiap bulan	70
13. Pengalaman kerja responden	71
14. Intensitas penangkapan ikan oleh iesponden	72
15. Waktu operasi penangkapan ikan yang dilakukan oleh responden	74
16. Besar biaya yang dibutuhkan responden dalam melakukan penangkapan ikan	75
17. Banyaknya hasil tangkapan yang diperoleh responden setiap kali melakukan penangkapan ikan	77

18. Jenis alat tangkap yang digunakan responden	79
19. Jenis perahu yang digunakan responden	80
20. Lokasi pemasaran hasil tangkapan responden	81
21. Matriks SWOT, Strategi pengembangan perikanan laut berbasis potensi wilayah pesisir di Kota Parepare pada bidang pengembangan sumber daya manusia .	97
22. Matriks SWOT, Strategi pengembangana perikanan laut berbasis potensi wilayah pesisir di Kota Parepare pada bidang pengembangan infrastruktur	100
23. Matriks SWOT, Strategi pengembangan perikanan laut berbasis potensi wilayah pesisir di Kota Parepare pada bidang kebijakan pemerintah	104

DAFTAR GAMBAR

Nomor		Halaman
1.	Kerangka Pikir Penelitian	26
2.	Peta Wilayah Administrasi Kota Parepare	28
3.	Denah Pembangunan PPI Cempae Kota Parepare	59

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kedudukan sebuah kota dalam suatu wilayah pengembangan sangat penting dan strategis sebagai tempat berbagai aktivitas masyarakat secara dinamis terus berlangsung sehingga merupakan faktor utama dalam merangsang pertumbuhan dan perkembangan daerah sekitarnya (hinterland). Dengan demikian, sebuah wilayah kota dapat dipandang sebagai pusat berbagai pelayanan. Kota-kota besar di dunia pada umumnya berawal dari tepian air. Potensi air sebagai infrastruktur transportasi tertua dan termurah menurut sejarah mendorong tumbuhnya kota pantai di berbagai wilayah.

Indonesia merupakan negara kepulauan, dengan lebih dari 17.000 pulau, dan panjang pantai sekitar 81.000 km. Sebagai wilayah tropis, perairan laut pesisir Indonesia dengan keanekaragaman hayati yang cukup tinggi, merupakan modal dasar yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan nasional.

Wilayah pesisir merupakan salah satu wilayah di permukaan bumi yang sangat menjanjikan. Interaksi antara daratan dan lautan menjadikannya suatu wilayah yang unik secara geologi, ekologi, dan

biologi dan juga sangat penting bagi berbagai bentuk kehidupan darat dan laut, termasuk manusia. Nilai penting dan manfaat wilayah pesisir sesungguhnya tidak dapat dinyatakan dengan mudah. Wilayah ini merupakan wilayah yang paling produktif dan dapat diakses oleh manusia, ketersediaan ikan dan berbagai makanan dari laut lainnya telah menjadi bahan makanan yang penting bagi jutaan orang di seluruh dunia, juga ribuan kegiatan budidaya pesisir dan industri yang ada telah menghidupi ribuan komunitas-komunitas masyarakat pesisir.

Kawasan pesisir Kota Parepare merupakan salah satu wilayah kota yang terus berkembang. Hal tersebut didukung oleh letak pada jalur utama lalu lintas darat Sulawesi Selatan dengan Sulawesi Barat dan lalu lintas laut regional, nasional ditambah ke Tawao Malaysia yakni Pelabuhan Nusantara serta Pelabuhan Cappa Ujung dengan Pelabuhan perahu tradisional dekat kompleks gerbang niaga dan Pasar Lakessi Soreang. Keberadaan jalur lalu lintas darat dan laut ini sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan penduduk khususnya yang berada di kawasan pesisir.

Penduduk yang berdiam pada kawasan ini bersifat heterogen terdiri dari berbagai macam suku bangsa yang kegiatan penduduknya berkembang secara dinamis. Kondisi tata bangunan di kawasan pesisir berkembang kurang teratur. Beberapa bangunan tidak mengikuti peraturan garis sempadan pantai sehingga tidak tertata dengan baik

sehingga diperlukan pengamanan sempadan pantai untuk mengantisipasi pemanfaatan lahan yang berkembang sangat cepat dan pada suatu saat akan berkembang ke arah pantai.

Kota Parepare terletak di pesisir barat Pulau Sulawesi dengan teluk di sebelah barat dan perbukitan di sebelah timur. Kawasan pesisir Kota Parepare merupakan salah satu wilayah kota yang terus berkembang dengan jarak 100 m dari garis tertinggi ke arah darat dan daerah pantai dangkal dengan kedalaman sampai dengan 1,5 m waktu pasang. Kota Parepare dengan wilayah pesisimya, secara administrasi mencakup bagian dari:

1. Kecamatan Soreang terbagi atas 7 kelurahan dengan 3 kelurahan yang berada di kawasan pesisir antara lain Kelurahan Kampung Pisang, Watang Soreang dan Lakessi.
2. Kecamatan Ujung terbagi atas 5 kelurahan dengan 3 kelurahan yang berada di kawasan pesisir antara lain Kelurahan Labukkang, Mallusetasi dan Ujung Sabbang.
3. Kecamatan Bacukiki terbagi atas 9 kelurahan dengan 5 kelurahan yang berada di kawasan pesisir antara lain Kelurahan Lumpue, Sumpang Minangae, Cappa Galung, Tiro Sompe dan Kampung Baru

Berdasarkan Data Statistik Kota Parepare dalam angka Tahun 2004/2005, jumlah penduduk Tahun 2003 berjumlah 113.161 jiwa, Tahun 2004 berjumlah 115.406 jiwa dan Tahun 2005 berjumlah 118.266 jiwa

atau 24.148 Kepala Keluarga. Sesuai dengan data tersebut, maka penduduk Kota Parepare mengalami penambahan setiap tahunnya. Sedangkan Data Penduduk Miskin di Kota Parepare berjumlah 5.690 Kepala Keluarga dengan penduduk miskin yang berada di kawasan pesisir berjumlah 2.741 Kepala Keluarga (Penduduk miskin kawasan pesisir \pm 48% dari jumlah seluruh penduduk miskin yang ada di Kota Parepare).

Daerah datar di pesisir cukup tinggi tidak cukup lebar sehingga kepadatan bangunan di pesisir yang merupakan kota lama sangat tinggi. Penduduk termasuk migran yang datang dari daerah lain yang bekerja di kota lama sebagian besar bertempat tinggal di sekitar daerah perdagangan yang terdapat di wilayah pesisir.

Masyarakat pesisir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan di wilayah pesisir. Dengan bertambahnya jumlah penduduk di wilayah pesisir yang menggantungkan hidupnya pada hasil laut akan memberikan pengaruh terhadap kebutuhan hidup mereka. Untuk mengatasi permintaan kebutuhan yang terus meningkat, perlu diikuti dengan kenaikan jumlah produksi, dan untuk itu diperlukan teknologi industri yang memadai, baik kualitas dan kuantitas, serta tenaga atau sumber daya manusia yang berkualitas (tingkat pendidikan).

Krisis ekonomi yang melanda, sehingga terjadi peningkatan jumlah masyarakat miskin. Berdasarkan pengamatan sementara,

penduduk yang termasuk dalam kategori miskin bermukim sebagian besar di kawasan pesisir pantai Kota Parepare dengan mata pencaharian sebagai nelayan dengan pendapatan tidak tetap, tergantung pada kegiatan menangkap ikan, hal ini dapat diketahui dari jumlah penerima beras miskin.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyatakan bahwa Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sedangkan Pembangunan nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pada pasal 18 ayat 3 menyatakan bahwa kewenangan daerah untuk mengelola sumber daya di wilayah laut. Sebagai realisasinya Pemerintah Kota Parepare telah membuat Daftar Inventarisasi Kewenangan dan Urusan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kota Parepare berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004. Dengan adanya Undang-Undang Otonomi Daerah tersebut, maka Pemerintah Daerah dapat mengembangkan seluruh potensi yang ada di setiap bidang dalam pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat sehingga tidak terpuruk dalam kemiskinan yang berkepanjangan.

Dari deskripsi kondisi permasalahan tersebut di atas, menjadi obyek yang menarik dan mendorong peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul "Pengembangan Perikanan Laut Berbasis Potensi Wilayah Pesisir di Kota Parepare".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan deskripsi latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka dapat disusun beberapa rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apa sajakah potensi yang dimiliki oleh wilayah pesisir dan hambatan yang dihadapi dalam pengembangan perikanan laut di Kota Parepare?
2. Bagaimanakah strategi pengembangan perikanan laut berbasis potensi wilayah pesisir di Kota Parepare ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menilai potensi yang dimiliki oleh wilayah pesisir dan hambatan yang dihadapi dalam pengembangan perikanan laut di Kota Parepare
2. Untuk menemukan strategi pengembangan perikanan laut berbasis potensi wilayah pesisir di Kota Parepare untuk meningkatkan taraf kehidupan nelayan tangkap.

D. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan, yang dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Sebagai bahan informasi bagi Pemerintah Daerah Kota Parepare dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang mendukung pengembangan perikanan laut berbasis potensi wilayah pesisir untuk mensejahterahkan kehidupan masyarakatnya.
2. Sebagai bahan referensi dan informasi bagi peneliti yang berminat untuk mengkaji masalah-masalah yang berhubungan dengan pengembangan wilayah khususnya pengembangan di sektor perikanan laut untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat pesisir serta sebagai bahan perbandingan bagi para peneliti selanjutnya.

E. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

Penelitian ini dibatasi menurut ruang lingkup analisis dan pembahasan, meliputi: 0000000

1. Penelitian ini dilaksanakan di Pesisir Pantai Kota Parepare, dengan analisis mengenai potensi wilayah yang terdapat dalam wilayah pesisir Kota Parepare antara lain: Sumber Daya Manusia yakni Masyarakat Pesisir dengan mata pencaharian sebagai nelayan tangkap berdasarkan tingkat pendidikan dan pendapatannya, ketersediaan dan penggunaan sarana berupa Alat tangkap (jenis,

kapasitas dan jumlahnya), perahu/kapal, PPI/TPI dan Industri yang bergerak di sektor perikanan laut.

2. Membahas mengenai strategi pengembangan perikanan laut berbasis potensi wilayah pesisir di Kota Parepare untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

- a. La Ode Ilham (2004) yang berjudul Strategi Perbaikan Ekonomi Masyarakat Nelayan Kecamatan Lakudo di Kabupaten Buton mengemukakan bahwa Strategi Peningkatan Pendapatan Masyarakat Nelayan dapat dilakukan dengan melalui 1)Peningkatan Sumber Daya Manusia seperti penyuluhan, pendidikan dan pelatihan 2)Peningkatan Modal dalam bentuk penggunaan teknologi 3)Peningkatan kemampuan mengorganisasikan diri melalui lembaga-lembaga produktif 4)Pengembangan dan pelestarian nilai-nilai kearifan lokal. Selain itu, upaya pemerintah daerah setempat membantu dan memperluas jaringan informasi serta pengelolaan kawasan konservasi laut secara terpadu. Adapun harapan ke depan La Ode Ilham menghendaki bahwa pengembangan yakni perlu adanya pembentukan Sumber Daya Manusia dengan tingkat kompetensi dan kapasitas memadai dalam mengelola sumber daya kelautan, pemerintah perlu membuat regulasi yang lebih berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan dan optimalisasi pemanfaatan

sumber daya kelautan di wilayah pesisir dengan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi terapan sehingga memberikan kontribusi signifikan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir khususnya nelayan.

- b. Arifuddin (2004) yang berjudul Peranan Pemerintah Daerah Dalam Peningkatan Pendapatan Masyarakat Wilayah Pesisir di Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai mengemukakan bahwa tingkat pendapatan masyarakat nelayan di Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai sudah tinggi (di atas UMR Propinsi Sulawesi Selatan), namun ketimpangan distribusi pendapatan cukup besar/belum merata, faktor yang berpengaruh terhadap peningkatan produktivitas usaha masyarakat nelayan yaitu faktor modal/dana, prasarana dan sarana penangkapan, Sumber daya Manusia, Kelembagaan/hukum serta budaya masyarakat, peranan pemerintah daerah dalam peningkatan pendapatan masyarakat nelayan cukup berperan (tinggi). Bantuan penyuluhan, teknis dan modal memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan pendapatan nelayan. Sedangkan bantuan pemasaran mempunyai hubungan yang tidak signifikan terhadap peningkatan pendapatan nelayan tangkap. Adapun harapan ke depan Arifuddin menghendaki bahwa perubahan pola pikir atau pemberdayaan masyarakat baik melalui pendidikan formal maupun informal sehingga mampu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam pengembangan usaha secara mandiri. Dengan

begitu dapat diharapkan akan terjadi peningkatan produktivitas usaha/pendapatan, daya beli masyarakat serta Pendapatan Asli Daerah dan pertumbuhan ekonomi wilayah serta perlu intervensi pemerintah dan lembaga non pemerintah secara terpadu dalam memberikan bimbingan dan motivasi serta kemudahan dalam memperoleh sarana produksi/penangkapan terutama nelayan buruh sehingga mereka dapat memperbaiki taraf hidupnya.

- c. Mukhlis Isma (2002) yang berjudul Faktor Penghambat Peningkatan Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir di Kabupaten Sinjai mengemukakan bahwa kondisi sosial ekonomi masyarakat pesisir di Kabupaten Sinjai masih sangat rendah yang tercermin dari tingkat pendidikan serta pendapatan dengan ketimpangan distribusi pendapatan yang cukup besar sehingga masyarakat pesisir dikategorikan masyarakat miskin. Faktor penyebab kurang berkembangnya kondisi sosial ekonomi masyarakat pesisir adalah ketergantungan nelayan buruh terhadap nelayan pengusaha dalam kelompok kerja nelayan serta sistem bagi hasil dalam lembaga kenelayanan, kurangnya keberanian para nelayan untuk mengambil resiko dalam pengembangan usaha secara mandiri dan kondisi sosial budaya yang tercermin dalam pandangan tentang makna hidup, fungsi kerja, kemapanan ideal, dasar keberhasilan usaha dan penggunaan uang berlebih, belum banyak berubah. Faktor-faktor tersebut menjadi sebab terhadap lemahnya motivasi dan etos kerja mereka. Adapun

harapan ke depan Mukhlis Isma menghendaki bahwa perubahan pola pikir nelayan melalui pendidikan formal maupun informal, upaya perbaikan sistem kelembagaan antara nelayan buruh dengan dan nelayan pengusaha sehinggan tercipta hubungan saling menguntungkan bukan ketergantungan dan perlu adanya intervensi pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam memberikan bimbingan, motivasi dan kemudahan dalam memperoleh sarana produksi.

Berdasarkan ketiga hasil penelitian terdahulu tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang berpengaruh terhadap peningkatan produktivitas usaha masyarakat nelayan dalam peningkatan pendapatan yaitu faktor modal/dana, prasarana dan sarana penangkapan, SDM, Kelembagaan/hukum serta budaya masyarakat, ketergantungan nelayan buruh terhadap nelayan pengusaha dalam kelompok kerja nelayan serta sistem bagi hasil dalam lembaga kenelayanan, kurangnya keberanian para nelayan untuk mengambil resiko dalam pengembangan usaha secara mandiri serta peranan pemerintah sebagai fasilitator peningkatan SDM.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Wilayah

Rupert Vance dalam Amar (2004) mengemukakan pengertian wilayah adalah suatu daerah (area) homogen yang mempunyai karakteristik fisik dan kultur yang berbeda dengan daerah sekitarnya. Sebagai bagian dari wilayah nasional, suatu wilayah terbentuk dari adat istiadat dan cita-cita khas yang dimiliki oleh wilayah tersebut sehingga menjadi satu identitas yang berbeda dengan wilayah-wilayah lainnya. Djoko Sutarto (1998) membedakan pengertian antara wilayah, daerah dan kawasan sebagai berikut:

1. Wilayah, adalah suatu bagian dari permukaan bumi yang teritorialnya ditentukan atas dasar pengertian, batasan dan perwatakan geografis, seperti Wilayah Aliran Sungai (WAS), wilayah pantai dan wilayah negara.
2. Daerah, adalah suatu wilayah yang diartikan sebagai suatu teritorial yang pengertian, batasan serta perwatakannya didasarkan kepada wewenang administrasi pemerintahan yang ditentukan dengan peraturan perundangan tertentu, seperti daerah provinsi, kota dan kabupaten.

3. Kawasan adalah suatu wilayah yang teritorialnya didasarkan kepada pengertian, batasan dan perwatakan fungsional secara tersendiri, seperti kawasan industri, kawasan pusat kota dan kawasan pemukiman

Budiharsono dalam Arifuddin (2004) mengemukakan, bahwa wilayah didefinisikan sebagai suatu unit geografis yang dibatasi oleh kriteria tertentu yang bagian-bagiannya tergantung secara internal. Lebih lanjut diuraikan, wilayah menjadi 4 jenis, yaitu :

1. Wilayah Homogen, adalah wilayah yang dipandang dari satu aspek/kriteria mempunyai sifat-sifat atau ciri-ciri yang sama, misalnya dalam hal ekonomi, geografis, agama, suku dan sebagainya.
2. Wilayah Nodal, adalah wilayah yang secara fungsional mempunyai ketergantungan antara pusat (inti) dan daerah belakangnya (hinterland). Tingkat ketergantungan ini dapat dilihat dari arus penduduk, faktor produksi, barang atau jasa ataupun komunikasi dan transportasi. Batas wilayah nodal ditentukan sejauhmana pengaruh dari suatu pusat kegiatan ekonomi bila digantikan oleh pengaruh dari pusat kegiatan ekonomi lainnya.
3. Wilayah Administratif, adalah wilayah yang batas-batasnya ditentukan berdasarkan kepentingan administrasi pemerintah atau politik seperti Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan/Desa dan RW/RT.

Soekirno (dalam Budiharsono, 2001) mengemukakan dalam kaitan dengan pembangunan wilayah, maka pengertian wilayah administrasi merupakan pengertian yang paling banyak digunakan, disebabkan dua faktor yaitu :

- a. Dalam melaksanakan kebijaksanaan dan rencana pembangunan wilayah diperlukan tindakan-tindakan dari berbagai badan pemerintah. Dengan demikian, lebih praktis apabila pembangunan wilayah didasarkan pada satuan wilayah administrasi yang telah ada.
- b. Wilayah yang batasnya ditentukan berdasarkan atas satuan administrasi pemerintahan lebih mudah dianalisis, karena sejak lama pengumpulan data di berbagai wilayah berdasarkan pada satuan wilayah administrasi tersebut.

Namun dalam kenyataannya, pembangunan tersebut seringkali tidak hanya dalam satuan wilayah administrasi, sebagai contoh adalah pengelolaan pesisir dengan pengelolaan daerah aliran sungai yang batasannya bukan berdasarkan administrasi namun berdasarkan batas ekologis dan seringkali lintas batas wilayah administrasi sehingga penanganannya memerlukan kerjasama dari satuan wilayah administrasi yang terkait.

4. Wilayah Perencanaan, adalah wilayah yang memperhatikan koherensi atau kesatuan keputusan-keputusan ekonomi. Wilayah

perencanaan dapat dilihat sebagai wilayah yang cukup besar untuk memungkinkan terjadinya perubahan-perubahan penting dalam penyebaran penduduk dan kesempatan kerja, namun cukup kecil untuk memungkinkan persoalan-persoalan perencanaannya dapat dipandang sebagai suatu kesatuan sosial. Wilayah perencanaan bukan hanya dari aspek fisik dan ekonomi, namun ada juga dari aspek ekologis.

Wilayah pesisir dari konsep wilayah dapat dikategorikan termasuk dalam keempat jenis wilayah tersebut. Sebagai wilayah homogen, wilayah pesisir merupakan wilayah yang memproduksi ikan dalam hal ini penduduk dengan mata pencaharian sebagai nelayan, namun dapat dikatakan sebagai wilayah dengan tingkat pendapatan penduduknya tergolong di bawah garis kemiskinan. Sebagai wilayah nodal, wilayah pesisir seringkali sebagai wilayah belakang, sedangkan daerah perkotaan sebagai intinya. Sebagai wilayah belakang, wilayah pesisir merupakan penyedia input (pasar input) bagi inti dan merupakan pasar barang-barang jadi (output) dari inti. Sebagai wilayah administrasi, wilayah pesisir dapat berupa wilayah administrasi yang relatif kecil yaitu kecamatan atau desa, namun dapat juga berupa kabupaten/kota. Sedangkan sebagai wilayah perencanaan, batas wilayah pesisir lebih ditentukan dengan kriteria ekologis.

B. Konsep Pengembangan Wilayah

Amar (2004) mengemukakan bahwa “Pengembangan” dan “Pembangunan” mempunyai arti yang sedikit berbeda, namun dalam praktiknya sering dipergunakan untuk menjelaskan hal yang sama. Keduanya merujuk pada kata “*development*”. “Pembangunan” menjelaskan suatu kegiatan untuk mengadakan sesuatu yang baru dan belum ada sebelumnya, sedangkan “pengembangan” menjelaskan kegiatan untuk memperluas sesuatu yang sudah ada. Jadi pengembangan merupakan tahap lanjutan dari pembangunan.

Menurut Sujarto (1990) bahwa secara umum dapat diidentifikasi sejumlah determinan atau faktor - faktor yang berpengaruh dalam menentukan perkembangan wilayah perkotaan mencakup:

1. Faktor Sosial

Dua faktor sosial utama yang sangat berpengaruh dan menentukan pengembangan dan perkembangan kota umumnya adalah: faktor kependudukan dan kualitas kehidupan masyarakat.

2. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi yang berpengaruh dan menentukan di dalam perencanaan dan pembangunan kota adalah: kegiatan usaha, politik dan ekonomi.

3. Faktor Lahan

Dua hal dari faktor pertanahan yang berpengaruh dan menentukan di dalam perencanaan dan pembangunan adalah pola penggunaan lahan dan harga lahan.

C. Batasan Wilayah Pesisir

Menurut Supriharyono (2000) Wilayah pesisir merupakan daerah pertemuan antara darat dan laut; ke arah darat meliputi bagian daratan, baik kering maupun terendam air, yang masih dipengaruhi sifat-sifat laut seperti pasang surut, angin laut, dan perembesan air asin; sedangkan ke arah laut meliputi bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses-proses alami yang terjadi di darat seperti sedimentasi dan aliran air tawar, maupun yang disebabkan oleh kegiatan manusia di darat seperti penggundulan hutan dan pencemaran.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pada Pasal 18 ayat 4 dinyatakan bahwa Kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut paling jauh 12 mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan untuk provinsi dan 1/3 dari wilayah kewenangan provinsi untuk kabupaten/kota.

Kedua definisi wilayah pesisir tersebut di atas secara umum memberikan gambaran besar, betapa aktivitas ekonomi dan ekologi terjadi sangat kompleks di wilayah ini. Kompleksitas aktivitas ekonomi seperti

perikanan, pariwisata, pemukiman, perhubungan, dan sebagainya memberikan tekanan yang cukup besar terhadap keberlanjutan ekologi wilayah pesisir seperti ekosistem mangrove, padang lamun dan terumbu karang. Tekanan yang demikian besar tersebut jika tidak dikelola secara baik akan menurunkan kualitas dan kuantitas sumber daya yang terdapat di wilayah pesisir.

Kawasan pesisir sebagai suatu satuan wilayah pengembangan merupakan wadah berkembangnya suatu wilayah yang dicerminkan oleh interaksi kegiatan sumber daya manusia dengan sumber daya lainnya (sumber daya alam dan sumber daya buatan) pada ruang kawasan yang bersangkutan. Interaksi sumber daya dalam bidang ekonomi, sosial dan lainnya, interaksi dan perilaku dipengaruhi oleh banyak faktor diantaranya sikap pelaku petani dan nelayan dan penerapan teknologi. Makin maju dan terampil petani dan nelayan serta makin maju teknologi (sarana dan prasarana) yang diterapkan, maka wilayah pengembangan (kawasan pesisirnya) makin luas pula (Rahardjo Adisasmita).

Batasan wilayah pesisir memberikan pengertian bahwa ekosistem pesisir merupakan ekosistem yang dinamis dan mempunyai kekayaan habitat yang beragam, di darat maupun di laut serta saling berinteraksi antara habitat tersebut. Selain mempunyai potensi yang besar, wilayah pesisir memiliki arti strategis karena merupakan wilayah peralihan (interface) antara ekosistem darat atau laut serta memiliki

potensi sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan yang sangat kaya. Kekayaan sumber daya tersebut menimbulkan daya tarik dari berbagai pihak untuk memanfaatkan sumber dayanya dan berbagai instansi untuk menangani pemanfaatannya.

Untuk batasan wilayah antara Kota Parepare dengan kabupaten yang berada di sekitarnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Daerah, namun sampai saat ini batas wilayah antara Kota Parepare dengan Kabupaten Pinrang dan Kota Parepare dengan Kabupaten Sidenreng Rappang masih menunggu hasil Topografi Kodam VII Wirabuana selaku pelaksana pelacakan di lapangan, sedangkan batas wilayah antara Kota Parepare dengan Kabupaten Barru belum dilakukan pelacakan disebabkan oleh keterbatasan dana untuk pelaksanaan pelacakan wilayah tersebut.

D. Lingkungan Sosial Pesisir dan Nelayan

Indonesia memiliki keanekaragaman hayati ketiga terbesar di dunia, juga memiliki keragaman etnis dan budaya yang menciptakan keragaman lingkungan sosial di Indonesia. Selain pengalaman sejarah dan dinamika masyarakat yang berbeda, terbentuknya keragaman lingkungan sosial juga disebabkan kondisi geografis dan ragam ekosistem yang ada. Dengan memperhatikan hal tersebut, keragaman lingkungan sosial di Indonesia, dapat dilihat berdasarkan lokalitas/geografis dibagi

menjadi lingkungan sosial pesisir dan pedalaman atau perairan dan daratan (Makarín Nabel).

Dalam pendekatan geografis – budaya lingkungan sosial pesisir secara umum mencakup kesatuan hidup manusia yang berdiam dan mengembangkan kehidupan sosial di daerah yang relatif dekat ke laut, dalam kategori lingkungan sosial pesisir adalah masyarakat yang berdiam di daratan dekat dengan laut dan masyarakat yang secara khas menghabiskan sebagian besar masa hidupnya di atas perairan laut. Komunitas perairan laut memiliki ketergantungan hidup kepada sumber daya alam daratan juga sama besarnya dengan ketergantungan kepada sumber daya perairan.

Indonesia merupakan Negara kepulauan tetapi hanya sebagian kecil saja dari penduduknya yang berdiam, hidup dan menyesuaikan diri dengan lingkungan pesisir. Berdasarkan hubungan, adaptasi dan pemahaman terhadap daerah pesisir dengan segala kondisi geografisnya, maka masyarakat yang berdiam di pesisir dapat dikategorikan atas beberapa tipe, antara lain :

- a. Masyarakat Perairan, kesatuan-kesatuan sosial yang hidup dari sumber daya perairan (laut, sungai atau pantai), cenderung terasing dari kontak-kontak dengan masyarakat lain, lebih banyak berada di lingkungan perairan dari pada darat, dan berpindah-pindah tempat di suatu wilayah (teritorial) perairan tertentu.

- b. Masyarakat Nelayan, golongan masyarakat pesisir yang paling banyak memanfaatkan hasil laut dan potensi lingkungan perairan dan pesisir untuk kelangsungan hidup, umumnya telah bermukim secara tetap dan mudah memahami kontak dengan masyarakat lain. Hasil laut yang mereka peroleh tidak dikonsumsi sendiri, tetapi didistribusikan dengan imbal ekonomi kepada pihak lain serta kehidupan sosial budaya mereka lebih banyak di daratan.
- c. Masyarakat Pesisir Tradisional, masyarakat yang berdiam dekat perairan laut tetapi sedikit sekali menggantungkan kelangsungan hidupnya dari sumber daya laut mengutamakan kegiatan subsistensi di daratan, lebih menguasai pengetahuan mengenai lingkungan darat.

E. Karakteristik Masyarakat Pesisir/Nelayan

Sebelum membicarakan mengenai masyarakat pesisir khususnya nelayan, terlebih dahulu perlu dipahami mengenai konsep masyarakat itu sendiri. Masyarakat adalah setiap kelompok manusia yang hidup dan bekerja dalam jangka waktu cukup lama, sehingga mereka dapat mengorganisasikan diri dan sadar, bahwa mereka merupakan suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang jelas (Mattulada, 1997). Sedangkan Soekanto (2002) merinci unsur-unsur masyarakat yaitu manusia yang hidup bersama, bercampur dalam waktu yang lama, sadar sebagai suatu kesatuan dan sadar sebagai suatu sistem hidup bersama.

Selanjutnya Mattulada (1997) mengemukakan masyarakat pesisir adalah sekelompok manusia hidup bekerjasama di suatu daerah tertentu yang disebut pantai. Sementara itu orang yang bertempat tinggal di pesisir pantai dan mempunyai mata pencaharian sebagai penangkap ikan dan hasil laut lainnya disebut sebagai nelayan.

Kota Parepare dengan panjang garis pantai 11,6 km di pesisir pantai Kota Parepare yang dijadikan oleh nelayan sebagai Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI), memiliki nelayan sebanyak 913 orang yang tersebar di 3 kecamatan. Nelayan dalam melakukan penangkapan ikan menggunakan 9 jenis alat tangkap dan berjumlah 411 buah alat tangkap. Produksi perikanan laut menghasilkan 3.795,9 Ton, lebih dari 13 jenis ikan hasil tangkapan dengan Rumah Tangga Perikanan sebanyak 386 RTP. Sedangkan industri yang bergerak di sektor perikanan sebanyak 25 perusahaan. Dengan potensi tersebut, diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat nelayan.

Satria (2002) membagi nelayan berdasarkan status penguasaan kapital, yaitu nelayan pemilik/punggawa dan nelayan buruh. Nelayan pemilik/punggawa yaitu orang yang memiliki sarana penangkapan, seperti kapal/perahu, jaring dan alat tangkap lainnya. Sedangkan nelayan buruh adalah orang yang menjual jasa tenaga kerja sebagai buruh dalam kegiatan penangkapan ikan laut.

Mubyarto, dkk (1984) mengemukakan bahwa masyarakat nelayan ditinjau dari aspek ekonomi memiliki stratifikasi yaitu :

- a. Nelayan kaya yang mempunyai kapal dan mempekerjakan nelayan lain sebagai pandega, tanpa ia sendiri ikut bekerja;
- b. Nelayan kaya yang mempunyai kapal, tetapi ia sendiri masih ikut bekerja sebagai awak kapal;
- c. Nelayan sedang yang kebutuhan hidupnya dapat ditutupi dengan pendapatan pokoknya dari bekerja sebagai nelayan dan mempunyai perahu tanpa mempekerjakan tenaga dari luar keluarga;
- d. Nelayan miskin yang pendapatan dari perahunya yang tidak mencukupi kebutuhan lainnya, sehingga harus ditambah dengan bekerja lain, untuk kebutuhannya beserta keluarganya;
- e. Nelayan pandega atau nelayan sawi yang tidak mempunyai perahu, sehingga kebutuhan hidupnya dipenuhi dengan bekerja sebagai awak kapal.

Karakteristik utama dari masyarakat pesisir, antara lain:

- a. Sistem Pengetahuan, teknik penangkapan ikan pada umumnya didapat dari pendahulu mereka berdasarkan pengalaman empiris;
- b. Sistem Kepercayaan, secara teologis nelayan masih mempercayai bahwa laut memiliki kekuatan magis, sehingga perlu perlakuan-perlakuan khusus dalam melakukan aktivitas penangkapan ikan agar keselamatan dan hasil tangkapan semakin terjamin;

- c. Peran Wanita, selaku isteri nelayan yang bergelut dalam urusan domestik rumah tangga juga menjalankan fungsi-fungsi ekonomi dalam melakukan penangkapan ikan di perairan dangkal, pengolahan ikan maupun kegiatan jasa dan perdagangan;
- d. Posisi Sosial Nelayan, masih dianggap rendah disebabkan oleh keterasingan nelayan yang kurang kesempatannya dalam melakukan interaksi dengan masyarakat lain. Lebih banyak alokasi waktu nelayan, untuk melakukan penangkapan ikan di laut daripada sosialisasi dengan masyarakat lain secara geografis relatif jauh dari pantai.

F. Kerangka Pemikiran

Beberapa faktor yang melatar belakangi terjadinya kemiskinan di wilayah pesisir Kota Parepare, yakni pertambahan dan kepadatan penduduk, masyarakat pesisir yang bekerja sebagai nelayan tangkap kurang memanfaatkan potensi yang ada.

Kondisi letak Kota Parepare yang strategis dengan jalur lalu lintas darat Sulawesi Selatan dengan Sulawesi Barat dan dapat menghubungkan antara kabupaten/kota yang berada Sulawesi Selatan serta jalur lalu lintas laut regional, nasional ke Tawao Malaysia. Hal tersebut didukung dengan keberadaan beberapa pelabuhan seperti Pelabuhan Nusantara, Pelabuhan Cappa Ujung dan pelabuhan perahu tradisional. Keberadaan pelabuhan juga memberikan pengaruh terhadap

pertambahan penduduk yang senantiasa mengalami pertumbuhan setiap tahunnya namun dapat juga dimanfaatkan untuk pengembangan industri hasil produksi perikanan.

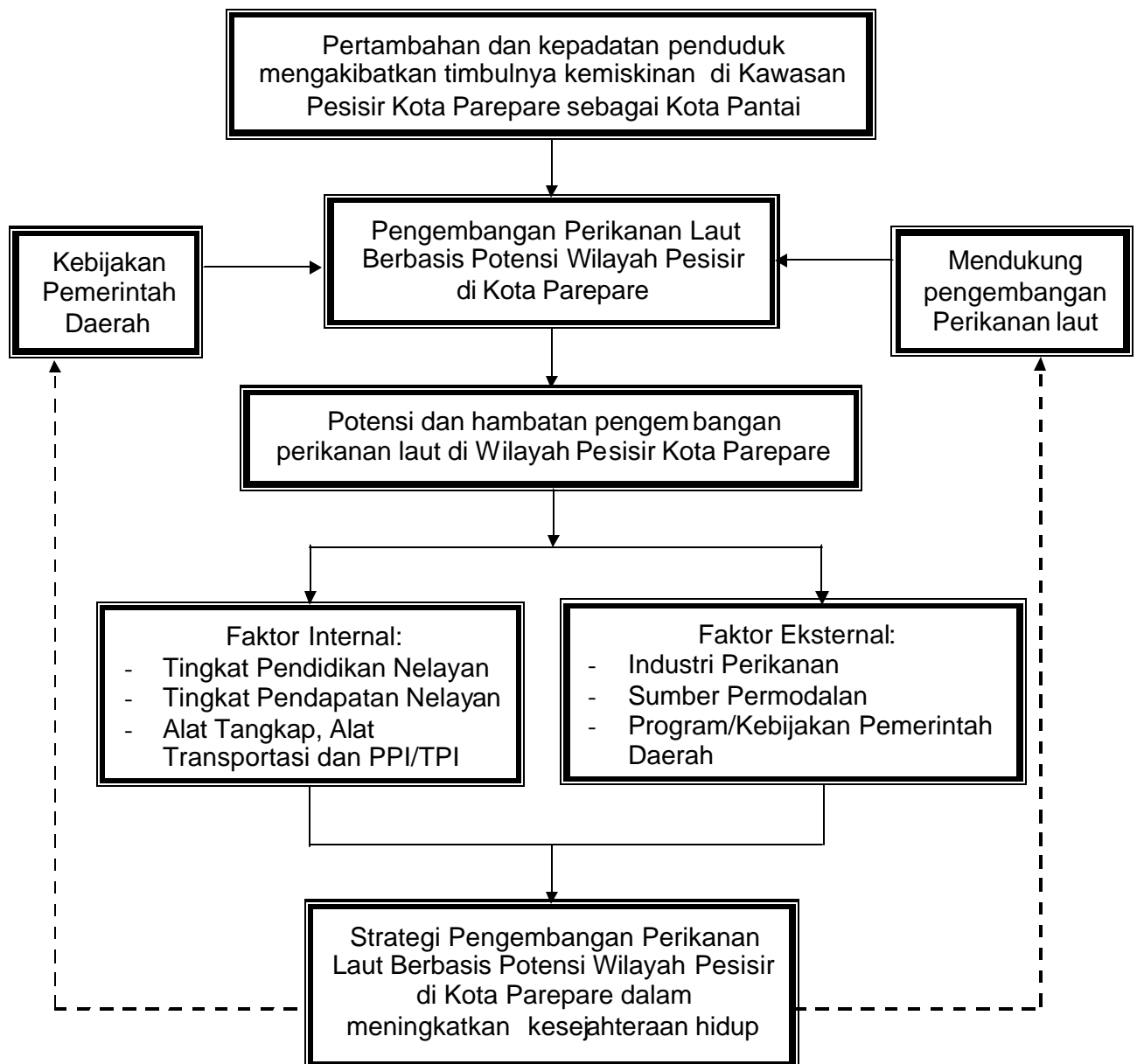
Kota Parepare sebagai kota pantai dengan pusat kota yang berada di pesisir pantai terus mengalami perkembangan. Pesisir sebagai pusat kota tempat berbagai aktifitas yang dilakukan oleh masyarakat mengakibatkan kepadatan terjadi baik berupa keragaman aktifitas maupun jumlah penduduk, sehingga kemiskinan khusus masyarakat pesisir dengan mata pencaharian sebagai nelayan tangkap.

Kemiskinan yang terjadi di masyarakat pesisir dengan mata pencaharian sebagai nelayan tangkap dilakukan dengan mengembangkan potensi yang dimiliki oleh nelayan tangkap, dan dalam kerangka pikir ini diidentifikasi faktor internal antara lain tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, alat tangkap, alat transportasi dan TPI/PPI dan faktor eksternal antara lain industri perikanan, sumber permodalan dan program/kebijakan pemerintah daerah.

Setelah kedua faktor tersebut ditentukan, maka langkah selanjutnya adalah mengoperasionalkan faktor-faktor tersebut dalam bentuk indikator-indikator yang ditabulasi dan persentase, kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis SWOT untuk mengetahui strategi pengembangan perikanan laut berbasis potensi wilayah pesisir dalam mendukung pengembangan perikanan laut melalui kebijakan pemerintah

daerah. Adapun kerangka pikir dalam penelitian ini dapat dilihat sebagaimana tercantum pada Gambar 1.

KERANGKA PEMIKIRAN



Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian